

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) saat ini merupakan suatu permasalahan yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Kasus-kasus KKA yang terus terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor swasta, namun kini merambah pada sektor publik. Saat ini, terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara maupun daerah dan berbagai organisasi publik lainnya.

Masyarakat menilai bahwa KKA ini perlu diberantas karena dalam kurun waktu yang singkat KKA dapat merugikan sebuah organisasi. Kerugian tersebut dapat berupa volume produktivitas organisasi melemah, kepercayaan masyarakat yang dilayani beralih ke organisasi lain, dan mitra kerja tidak selera lagi untuk tetap bekerja sama. Di sisi lain, kasus KKA tidak terlepas dari pemberitaan media massa, sehingga reputasi organisasi yang telah terbangun menjadi tercemar. Hal tersebut dapat mempersulit daya saing dalam meraih persaingan pasar yang semakin tajam.

Universitas sebagai lembaga publik ditengarai tidak terlepas dari hal demikian. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2010 menginformasikan bahwa terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak tersalurkan dan belum disetor kembali ke kas negara. Selain itu, terdapat pembayaran ganda honorarium dan perjalanan dinas, pungutan dari

masyarakat yang dihimpun universitas banyak yang tidak transparan, serta adanya rekening aktif yang dibuka tanpa memberitahukan kepada Kementerian Keuangan sehingga dapat dikategorikan rekening ilegal (Kompas, 2011). Temuan itu lalu berkembang pada pengelolaan kas yang tidak tertib sehingga mendorong BPK untuk mengeluarkan opini audit disclaimer atau tidak memberikan pendapat (TMP).

Menghadapi bahaya yang disebabkan oleh adanya KKA maka banyak pihak setuju untuk tidak memberikan peluang bagi terjadinya KKA. Berbagai kebijakan dalam penanggulangan KKA telah ditetapkan, antara lain TAP MPR XVI Tahun 1998, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Soepardi, 2007). Perkembangan ini menandakan bahwa banyak pihak berkeinginan menangani KKA secara serius dan untuk itu diperlukan lingkungan yang kondusif.

Berbagai aturan yang dibuat untuk menanggulangi KKA tidak serta merta membuat lembaga di Indonesia bersih dari KKA. Kenyataannya KKA tetap terjadi dan berkembang dari sisi kualitas maupun kuantitas, tidak terkecuali di universitas. Hal ini menimbulkan kekecewaan di masyarakat karena universitas sebagai lembaga publik seharusnya memiliki ciri dan komunitas yang berbeda dengan lembaga publik di atas dan bersih dari KKA.

Menurut Tuanakotta (2007) pencegahan KKA dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan KKA sangat besar (Hermiyetti, 2012). Hal ini didukung dengan data hasil KMPG Fraud Survey 2012 yang menemukan bahwa KKA terjadi karena pelaku internal tidak berfikir mereka akan tertangkap.

Hal lain yang dapat menyebabkan KKA adalah sistem kompensasi (Rivai, 2004: 358) dan asimetri informasi (Wilopo, 2006). Kompensasi yang dikelola dengan baik akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, sebaliknya kompensasi yang tidak adil akan menimbulkan ketidakpuasan karyawan sehingga dapat memicu kecurangan (KKA). Sedangkan mekanisme asimetri informasi sering kali memicu terjadinya KKA melalui manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer kepada pemilik modal. Hal tersebut dapat terjadi karena manajer lebih tahu kondisi perusahaan dibandingkan pemilik modal.

Universitas merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat bersih dari KKA. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi KKA di Universitas perlu dilakukan. Penelitian ini hendak menguji dan memberikan bukti empiris dari pengaruh sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dibagian keuangan universitas. Penelitian ini akan dilakukan di tiga Universitas di Yogyakarta.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Aryanto *et.al.* (2013). Perbedaan penelitian dari penelitian sebelumnya adalah tahun yang tidak sama dan dari objek yang berbeda diharapkan dengan perbedaan objek dapat memberikan hasil yang lebih *representative* karena menambah objek dalam penelitian.

B. Batasan Masalah Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah apakah sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, dan asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang akan dirincikan sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah sistem kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Mengetahui apakah sistem kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Mengetahui apakah asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan referensi mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi khususnya di bagian keuangan Universitas.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang bermanfaat terhadap bagian keuangan Universitas terutama dalam meningkatkan sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, serta menghindari asimetri informasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi khususnya di bagian universitas.